



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI YHUDO WIJAYANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 969729

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414F TIPE2 SDX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 X1H02N35M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 AT11121B01 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX 160 CBS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 772.000.000

III. HUTANG Rp. 165.468.696

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 606.531.304

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.